



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2008-2009**

JUM'AT, 15 AGUSTUS 2008

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2008-2009**

JUM'AT, 15 AGUSTUS 2008

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang saya hormati:

- **Saudara Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,**
- **Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara,**
- **Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,**
- **Yang Mulia Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat,**
- **Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna Dewan hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama berada di ruangan ini untuk mengikuti Sidang Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009. Agenda Sidang Paripurna Dewan hari ini adalah Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Tahun Sidang 2008-2009 dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-63 sekaligus penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2009.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dari catatan Sekretariat Jenderal, ... Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi yang ada di Dewan. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Pada kesempatan ini, perlu kami beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat, beberapa surat masuk. Pertama, surat dari Saudara Presiden RI perihal Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Surat Presiden RI perihal Penyampaian Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan, periode Tahun 2008-2013, sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi. Ketiga, Surat dari Pimpinan Komisi I DPR RI tentang Pengajuan RUU Usul Inisiatif tentang Perposan untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Keempat, Surat Presiden RI tentang Penyampaian RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). RUU ini sudah lama dinantikan oleh DPR untuk segera dilakukan pembahasan. Atas surat-surat tersebut, Dewan akan memprosesnya sesuai mekanisme dan Peraturan Tata Tertib.

Sidang Paripurna hari ini dihadiri oleh tamu-tamu yang terhormat, Peserta Program *Presidential Friends of Indonesia* terdiri dari 33 tokoh terkemuka dari 33 negara sahabat, sebagai tamu khusus Presiden RI, untuk berkunjung dan melihat langsung perkembangan Indonesia, sekaligus ikut merayakan kemerdekaan RI yang ke-63. Para tokoh tersebut terdiri dari kalangan media, pengusaha, akademisi, politisi, LSM dan tokoh masyarakat lainnya. *(Dimohon berdiri)*.

Sidang hari ini juga dihadiri oleh tamu dari Myanmar, dipimpin oleh Mr. Teddy Buri atas undangan Pimpinan DPR RI. Kehadirannya di Jakarta untuk ikut menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-63. *(Dimohon berdiri)*.

Beberapa anggota Parlemen Palestina (*Palestinian Legislative Council/PLC*) sedianya juga akan hadir di tengah-tengah kita memenuhi undangan Pimpinan DPR RI. Namun, karena situasi di dalam negeri tidak mengizinkan, mereka tidak dapat hadir di tengah-tengah kita.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dua hari lagi, segenap bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-63. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan hari yang paling bersejarah, merupakan puncak dari perjalanan dan perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tiga ratus lima puluh tahun atau tiga setengah abad lamanya, bangsa Indonesia dijajah, ditindas, dieksploitasi hasil buminya oleh imperialis dan kolonialis. Pembebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan merupakan momentum dari serangkaian peristiwa yang perlahan namun pasti, yang mengarah kepada satu tujuan: kemerdekaan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pergerakan kemerdekaan dibekali semangat pantang menyerah melalui perjuangan bersenjata, perjuangan politik, diplomasi dari berbagai pergerakan

organisasi-organisasi politik dan sosial, serta melalui pengorbanan yang sangat besar para pahlawan bangsa, telah membuahkan hasil, Indonesia merdeka. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya setiap memperingati Hari Kemerdekaan, kita senantiasa menundukkan kepala, memberikan penghormatan yang sangat dalam kepada Proklamator, para pejuang dan pahlawan, para *founding fathers* atas jasa-jasa dan pengorbanannya. Sebagai generasi penerus, kita harus bertekad dengan segenap jiwa dan raga untuk meneruskan perjuangannya, mewujudkan cita-cita Proklamasi sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-63 juga bersamaan dengan Peringatan genap satu abad Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2008 yang baru lalu. Lahirnya organisasi Budi Utomo satu abad yang lalu, telah memberikan inspirasi yang kuat bagi bangkitnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme di kalangan generasi muda pada saat itu menjadi momentum bagi pergerakan kaum muda yang memiliki cita-cita yang sama, menjadi bangsa yang merdeka dan selanjutnya mengantarkan kaum muda dalam merumuskan Sumpah Pemuda tahun 1928; satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu tanah air, tanah air Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kehidupan global dan tuntutan kemajuan dalam segala bidang, kemerdekaan bangsa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam format pembentukan kedaulatan ekonomi, demokratisasi, serta kebebasan rakyat Indonesia dari segala bentuk belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Indikator kemajuan di bidang ekonomi dan sosial inilah yang menentukan makna dan tingkat pencapaian kemerdekaan, sekaligus menandai adanya kemajuan bangsa dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan negara.

Kemerdekaan yang telah kita raih, hendaknya tidak dimaknai sekedar proses untuk kemerdekaan geo-politik atau penguasaan wilayah, tetapi juga merupakan usaha untuk kemerdekaan bangsa dalam dimensi kehidupan yang lebih baik, terutama kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perwujudan kesejahteraan rakyat, pemberian rasa aman, dan kehidupan yang berkeadilan. Peringatan hari kemerdekaan Indonesia, harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi nasional dalam memaknai kembali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menumbuhkan kembali karakter perjuangan dalam mendirikan dan membangun bangsa.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena tantangan dan kepentingan bangsa Indonesia dewasa ini telah berubah. Medan perjuangan telah bergeser jauh dibanding era Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, dari perjuangan melawan kolonialisme, menjadi perjuangan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, masih lemahnya penegakan hukum, belum optimalnya pengembangan demokrasi, masih

munculnya konflik antar-kelompok masyarakat, menurunnya penerapan nilai-nilai agama dan moralitas sebagian kecil masyarakat, masih adanya perlakuan yang tidak seimbang yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat berkaitan dengan kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinannya, berkembangnya pergaulan bebas, dan maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.

Di samping itu, tantangan terbesar kita adalah dampak negatif globalisasi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, berkembangnya "kolonialisme gaya baru," antara lain melalui politik, ekonomi, dan budaya yang sangat merugikan kepentingan dan kedaulatan negara-negara berkembang. Untuk Indonesia, masih dalam suasana transisi yang diwarnai dengan agenda-agenda besar, yaitu reformasi, demokratisasi, dan rekonstruksi dalam membangun Indonesia baru, yang harus tetap berada dalam koridor *fundamental consensus* yang telah diletakkan oleh para Pendiri Republik. Artinya, apa yang kita tata dan bangun kembali, harus tetap bertumpu, merujuk, dan mengacu pada **nilai, jati diri dan konsensus dasar kebangsaan**. Oleh karena itu, keinginan untuk mewujudkan stabilitas nasional yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, perlu terus dikembangkan dan didukung semua pihak.

Persoalan yang demikian besar, hanya dapat dihadapi dengan tekad, semangat, dan kekuatan besar untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Salah satu kekuatan besar yang perlu dibentuk adalah peneguhan kembali ikatan batin atau komitmen segenap komponen bangsa kepada cita-cita nasionalnya sebagai jati diri bangsa. Membangun jati diri adalah suatu proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai luhur yang terpancar dari hati nurani. Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, *Insy Allah* semua maksud dan cita-cita mulia tersebut dapat terwujud.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Sidang I ini berlangsung sampai dengan 24 Oktober 2008, Dewan akan memfokuskan kegiatannya untuk membahas RAPBN 2009. Sebelum penutupan Masa Sidang I pada akhir Oktober 2008, diharapkan pembahasan akan memasuki pembicaraan tingkat II, untuk mematuhi UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam Masa Sidang IV, Dewan sudah mulai melakukan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2009. DPR dan Pemerintah untuk sementara sudah menyepakati asumsi dasar RAPBN Tahun Anggaran 2009, antara lain: nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.5.200 sampai Rp.5.300 triliun; angka inflasi sebesar 5,8% sampai 6,5%; nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS sebesar Rp.9.000 sampai Rp.9.200; suku bunga SBI tiga bulan sebesar 7,5% sampai 8,5%; produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 927.000 sampai 950.000 barel per hari; harga minyak mentah Indonesia sebesar 95 sampai 120 Dolar AS per barel; dan defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,5% sampai 2,0%.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dua hari yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah **mengabulkan gugatan** Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk **menguji ulang UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 45 tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008, terhadap UUD 1945**. Kendati dalam putusannya mengabulkan gugatan PGRI, namun MK mengemukakan bahwa UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN Tahun Anggaran 2009. Ini dimaksudkan untuk menghindari resiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara. Apabila nanti dalam UU APBN 2009 ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai 20% dari APBN dan APBD, maka **MK cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan bahwa UU APBN tersebut inkonstitusional**. MK juga mendorong agar semua daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.

Menanggapi putusan tersebut, **Dewan memberikan respons positif**. Untuk itu, baik Pemerintah maupun Panitia Anggaran DPR RI dan komisi terkait dapat mengakomodir putusan MK ini dalam pembahasan RAPBN 2009. Peningkatan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% merupakan **langkah besar dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa** dan meningkatkan sumber daya manusia, sesuai amanat konstitusi. Dengan akan dipenuhinya putusan MK tersebut, **Dewan mengharapkan pengelolaan dana pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel**.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan APBN, Dewan meminta Pemerintah untuk terus memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia yang pada akhir-akhir ini cenderung mengalami penurunan, mengingat asumsi RAPBN sangat terkait dengan perkembangan harga minyak dunia. Namun demikian, Pemerintah tidak perlu reaktif dan terlalu cepat untuk kembali mengubah besaran asumsi dasar untuk harga rata-rata minyak mentah dalam negeri pada RAPBN 2009. Dewan berpendapat bahwa gejolak ekonomi dunia dan volatilitas harga minyak mentah dunia cenderung semakin tidak menentu sehingga sulit diprediksi. Untuk itu, proyeksi harga minyak sebaiknya berada pada level yang realistis dengan bercermin pada kondisi tahun 2008. Pemerintah harus lebih tajam menganalisa

kecenderungan gejolak minyak dunia dengan memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan dalam gejolak harga.

Persoalan energi khususnya krisis energi listrik mengundang perhatian Dewan. Keterbatasan pasokan listrik, bahkan pemadaman listrik secara bergilir oleh PLN sungguh memprihatinkan. Hal ini telah terjadi di beberapa daerah dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Karena krisis energi listrik inilah, Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan SKB 5 Menteri tentang pergeseran waktu kerja bagi industri manufaktur ke hari Sabtu dan Minggu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari pemadaman bergilir dan untuk memenuhi target PLN mendapatkan penghematan pemakaian listrik sekitar 600 MW. Kalangan Dewan pun masih meragukan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan ini. Dewan justru khawatir, kebijakan ini dapat bersifat kontra-produktif. Krisis energi listrik yang melatarbelakangi diberlakukannya pemadaman bergilir dan keluarnya SKB 5 Menteri, penyebab utamanya karena tidak lancarnya ketersediaan batubara yang cukup untuk kebutuhan di dalam negeri.

Dalam kaitan dengan masalah batubara, Dewan sangat menyayangkan terjadinya silang pendapat antara Pemerintah dan para kontraktor pengelola perusahaan tambang batubara mengenai pembayaran royalti kepada Pemerintah di satu pihak dan restitusi perpajakan di pihak lain. Dewan mengharapkan agar Pemerintah dan pengusaha dapat memiliki interpretasi yang sama atas masalah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita semua paham bahwa royalti hasil tambang ini sangat penting dalam memperkuat struktur anggaran negara terutama pemanfaatannya bagi kepentingan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan UUD 1945. Kepada Pemerintah pun diharapkan dapat menyelesaikan masalah restitusi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dewan juga mencatat bahwa Pemerintah baru saja menerbitkan paket kebijakan ekonomi melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 untuk memperbaiki iklim investasi. Krisis energi ini juga berdampak kepada iklim investasi. Keterbatasan energi sudah lama dikeluhkan oleh para investor. Oleh karena itu, harus tetap dijaga jangan sampai kebijakan iklim investasi tersebut gagal karena kebijakan instan yang dapat mengganggu sektor produktif.

Selanjutnya, Dewan juga menaruh perhatian besar berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam upaya memberdayakan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). **Dewan sangat setuju agar program bagi UMKM perlu dioptimalkan melalui berbagai fasilitas**, terutama akses modal. Seperti kita ketahui, usaha kecil membutuhkan kredit agar usaha mereka dapat terus berkembang. Namun, selama ini usaha kecil dan menengah selalu dihadapkan pada permasalahan yang klasik, yaitu akses dan bunga tinggi dalam memperoleh kredit.

Kenaikan suku bunga kredit dipastikan akan membuat beban usaha para pengusaha kecil makin berat. Tekanan semakin bertubi, dimana daya beli masyarakat menurun akibat inflasi yang tinggi. Dewan meminta agar pemerintah segera merealisasikan janji untuk pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan aset, yang mencapai Rp 14-15 triliun atau setara dengan 1,6 miliar dollar AS pada tahun ini.

Dewan akan melakukan pengawasan terhadap pengucuran kredit usaha rakyat tersebut agar pelaksanaannya tidak salah arah. Diakui bahwa untuk menjalankan pelayanan keuangan mikro secara profesional bukanlah hal yang mudah dan sederhana karena harus dilakukan secara efisien dan efektif.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait agenda Pemilu 2009, saat sekarang kita sudah memperoleh kepastian mengenai jumlah partai politik sebagai peserta pemilu. Di tingkat nasional sebanyak 34 partai politik, dan khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada 6 partai politik lokal yang lolos verifikasi administrasi dan faktual. Artinya, Pemilu 2009 mendatang akan diikuti sejumlah partai politik yang lebih banyak dibandingkan Pemilu 2004, yang diikuti 24 partai politik. Dengan telah ditentukan partai-partai politik peserta pemilu, diharapkan gairah demokrasi yang sedang tumbuh semarak dalam era reformasi saat ini, dapat terus meningkat kualitasnya dan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kematangan para elit partai dalam menggerakkan mesin partainya masing-masing untuk memperkuat iklim demokrasi yang sedang berkembang adalah kunci awal keberhasilan bagi pembangunan politik. Disadari, bahwa beban posisi kepartaian dalam menggerakkan demokrasi bukanlah pekerjaan ringan. Akan tetapi, melalui iklim keterbukaan dan partisipasi publik yang semakin dibuka ruang geraknya, maka sistem penyelenggaraan negara dan perangkat infrastruktur politik di tingkat masyarakat madani, diharapkan akan dapat tetap terjaga perkembangannya.

Tahapan kampanye sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 2008 dan akan berlangsung selama sembilan bulan tujuh hari. Kita perlu mengingatkan, bahwa kampanye yang cukup panjang tersebut hendaknya benar-benar memiliki makna yang signifikan bagi proses pendidikan politik. Kita berharap bahwa kampanye harus dilakukan secara **bermartabat, dengan menyampaikan visi, misi, dan program partai bagi kemajuan Indonesia ke depan. Kampanye tidak boleh diwarnai oleh *black campaign*, harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan tetap menjaga suasana yang kondusif.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan tugas konstitusional Dewan di bidang legislasi tetap menjadi acuan utama yang selalu digunakan masyarakat dalam menyoroti kinerja Dewan. Hal ini kita maklumi karena tugas utama Dewan sebagai lembaga legislatif adalah membuat undang-undang yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pedoman dalam berbagai aktivitas di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dewan tidak saja dituntut untuk melahirkan undang-undang dalam jumlah yang banyak, tetapi dituntut juga untuk melahirkan undang-undang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Upaya untuk melahirkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat telah dilakukan melalui mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Prolegnas, telah ditetapkan 284 RUU yang menjadi prioritas untuk DPR periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2007-2008, Dewan telah menyetujui 120 RUU menjadi UU. Dewan tentunya tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi perundang-undangan harus terus dioptimalkan. Kita berusaha, paling tidak 60% dari target Prolegnas harus dipenuhi, walaupun kita sadar banyak kendala yang mempengaruhi penyelesaian tugas-tugas Dewan, utamanya dalam hal produk perundang-undangan. Pimpinan Dewan mengajak **para Anggota Dewan yang juga anggota Partai Politik, untuk tetap fokus kepada pelaksanaan tugas Dewan** di tengah-tengah aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

Diharapkan Dewan tetap dapat menyelesaikan 64 RUU yang sedang dalam pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah. Beberapa RUU tersebut di antaranya adalah RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Kementerian Negara; RUU tentang Mineral dan Batubara; dan beberapa RUU tentang perubahan UU yang mengatur tentang lembaga negara.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, Dewan sebagai lembaga pembuat undang-undang memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka memenuhi UU No. 30 Tahun 2003 tentang KPK. Institusi ini telah menunjukkan prestasi dalam upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi. Hasil kerja KPK mendapatkan tempat yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal KPK telah dibentuk untuk melaksanakan tugas ini. Penangkapan terhadap aparat Kejaksaan Agung, pejabat/mantan pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk anggota Dewan dalam berbagai kasus, menunjukkan bahwa lembaga ini berusaha memaksimalkan tugas-tugasnya dalam memberantas korupsi.

Ke depan, kiranya KPK dapat bekerjasama dengan Dewan untuk mendalami hasil audit BPK yang telah disampaikan melalui Hasil Pemeriksaan Semester atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai bahan acuan dalam penanganan masalah pemberantasan korupsi. Perlu diketahui bahwa komisi-komisi Dewan pada umumnya telah menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menyikapi adanya penangkapan beberapa anggota Dewan oleh KPK beberapa bulan terakhir ini, **Dewan menyerahkan masalah ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.** Namun demikian, kita mengharapkan agar aparat penegak hukum dapat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam kaitan dengan kasus ini, **Dewan meminta kepada semua pihak agar dapat menghormati dan memahami lembaga DPR beserta tugas dan fungsi-fungsinya,** jangan sampai perbuatan beberapa orang yang ingin mengambil keuntungan bagi diri sendiri, kemudian lembaga ini menjadi "tercoreng". Dalam kerangka pembangunan politik yang sedang kita tegakkan, **lembaga DPR dengan domain politik yang dimilikinya, perlu diselamatkan.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang ini Dewan sedang memproses penyelesaian RUU tentang Penerbangan. Dengan diselesaikannya pembahasan RUU ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Komisi Uni Eropa dalam rangka pencabutan perpanjangan larangan terbang terhadap Maskapai Penerbangan Indonesia ke wilayah Eropa. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa penyelesaian pembahasan RUU Penerbangan bukan merupakan akhir dari permasalahan. Masyarakat dan khususnya Uni Eropa tetap mendasarkan pada komitmen Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan dari undang-undang dan berbagai regulasi di bidang penerbangan. Penyelenggaraan jasa angkutan udara yang mengabaikan keselamatan penumpang juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan jasa angkutan udara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang sosial kemasyarakatan, Dewan senantiasa memantau berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Program Wajib Belajar 9 Tahun harus terus dipacu pelaksanaannya, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang program yang telah ditetapkan. Pemerintah juga diminta untuk melakukan pengawasan

jangan sampai pungutan-pungutan liar yang membebankan orang tua siswa terutama pada saat penerimaan siswa baru terulang kembali.

Satu masalah yang juga kita mintakan perhatian Pemerintah adalah masalah pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kita minta program ini benar-benar dapat ditangani dengan baik agar masyarakat miskin yang jumlahnya cukup besar di tanah air mendapat jaminan kesehatan yang cukup baik. Kenyataan di lapangan sampai sekarang masih memprihatinkan. Kita tidak ingin hak-hak masyarakat miskin dalam rangka keselamatan jiwa mereka terabaikan.

Dalam kaitan dengan masalah kesehatan ini, Dewan merasa prihatin dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ratusan warga di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua yang disebabkan oleh **Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare-Kolera**. Dewan memberikan peringatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk lebih serius dalam menangani persoalan kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal-hal yang terjadi seperti yang terjadi di Provinsi Papua tidak terulang lagi. Dalam masalah Papua, DPR meminta perhatian mengenai status otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Status otonomi khusus ini dibarengi dengan meningkatnya APBD yang seharusnya dapat dirasakan manfaatnya bagi segenap warga di kedua provinsi tersebut. **DPR berkeyakinan apabila keseriusan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di sana diutamakan, maka pada saat yang sama bangsa ini telah dapat menyelesaikan masalah lain yaitu separatisme.** Jangan sampai, gerakan separatisme ini menjadi besar karena kesalahan kita sendiri dalam menjalankan manajemen pemerintahan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Situasi politik dan keamanan yang berkembang di berbagai kawasan dunia juga senantiasa menjadi perhatian Dewan. Situasi politik dan keamanan yang terjadi di beberapa negara yang hingga saat ini belum juga kondusif masih membuat kita merasa prihatin. Kita menyaksikan bahwa hingga saat ini persoalan keamanan masih menjadi salah satu tantangan terbesar sejumlah negara. Belum lagi hilang dari ingatan kita peristiwa ledakan bom mobil di Kabul, Afghanistan, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, belakangan ini kita dikejutkan kembali oleh peristiwa serangan bom di India dan Turki, yang mengakibatkan sejumlah warga sipil menjadi korban aksi kekerasan. Terakhir, kita semua mengamati berkembangnya situasi yang sangat mengkhawatirkan karena terjadinya konflik antara Rusia dan Georgia yang telah menewaskan ribuan orang terutama masyarakat sipil. Aksi kekerasan yang terjadi selama ini perlu segera dihentikan dengan cara lebih mengedepankan dialog.

Terkait dengan situasi yang berkembang di kawasan, khususnya ASEAN, Dewan berharap berbagai persoalan yang muncul dan masih belum terselesaikan di kawasan ini, dapat diatasi dengan cara-cara damai dan saling menghormati satu sama lain. Stabilitas kawasan memang perlu terus kita jaga, antara lain melalui peningkatan kerjasama keamanan di antara negara-negara ASEAN, dan juga melalui kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka membangun stabilitas kawasan, Dewan menyambut positif hasil Pertemuan Tingkat Menteri *ASEAN Regional Forum* yang ke-15 di Singapura bulan Juli yang lalu. Pemajuan demokrasi dan penegakan hak-hak asasi manusia juga perlu terus didorong dan dikembangkan di kawasan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Khusus Myanmar, Dewan kembali berharap kepada ASEAN untuk dapat melakukan peran yang lebih nyata lagi dalam mendorong berkembangnya demokrasi dan penegakan hak-hak asasi manusia** di negara ini, termasuk pembebasan pemimpin gerakan pro-demokrasi Aung San Syu Kyi yang telah ditahan selama bertahun-tahun, 6 tahun di antaranya sebagai tahanan rumah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkenaan dengan adanya surat dari anggota Kongres Amerika Serikat kepada Presiden RI mengenai permintaan pembebasan tanpa syarat dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah divonis pengadilan, kalangan Dewan prihatin atas sikap tersebut. Yakinlah bahwa konstitusi Indonesia menjamin perlindungan dasar atas Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, **kita tidak menghendaki adanya campur tangan yang berlebih dari pihak luar negeri terhadap masalah dalam negeri Indonesia, yang berarti mengecilkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan demokratis.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Terbentuknya lembaga parlemen yang kuat adalah kunci penting bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat, karena hakekatnya parlemen adalah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, membentuk undang-undang, menetapkan APBN serta mengawasi jalannya pemerintahan. Parlemen adalah lembaga inti pencapaian demokrasi. Pengakuan seperti ini kembali ditegaskan oleh Sidang Umum PBB tahun yang lalu yang telah memutuskan bahwa tanggal 15 September menjadi *International Day of Democracy*. Tanggal ini secara simbolis diambil dari *Interparliamentary Union (IPU)* yang mengadopsi *Universal Declaration on Democracy* pada bulan September 1997. Untuk itu, sebagai parlemen di negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, DPR ingin mengambil momentum dari peringatan *International Day of Democracy* yang pertama tahun ini, dengan mencanangkan

program pendidikan politik khususnya bagi generasi muda. Hal ini diharapkan dapat memupuk pemahaman sejak dini terhadap konsep demokrasi. Untuk itulah, pada tanggal 15 September 2008 yang akan datang, DPR merencanakan menggelar **Simulasi Rapat Kerja Parlemen Dengan Pemerintah** yang akan dilakukan oleh anak-anak kita siswa SMU yang terpilih dan dilaksanakan di Gedung DPR RI. Kami mengharapkan program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam forum rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi ke-63 dan Pengantar RUU APBN 2009, sebagaimana biasa perlu kami informasikan bahwa di tengah-tengah kita, di balkon utama telah hadir masyarakat teladan dari seluruh Indonesia atau mereka yang telah berprestasi bagi bangsa dan negara yang dikoordinir oleh instansi-instansi pemerintah, terdiri dari Peraih medali Emas Olimpiade Internasional di bidang Matematika, Fisika, dan Kimia, serta Olimpiade siswa SLB dan Guru PLB berdedikasi (*berdiri*); Kepala Desa dan Lurah berprestasi, serta Ketua LKMD/LPM (*berdiri*); Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan, Camat di desa dan Kelurahan Juara, serta Koordinator Statistik Kecamatan berprestasi (*berdiri*); Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi, Guru SD, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berdedikasi, serta Pemenang Karya Nyata dan Karya Tulis dan Seni (*berdiri*); Finalis Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) tingkat SMP dan SMA, Mahasiswa berprestasi, dan Peraih Medali Olimpiade Internasional tingkat SD, SMP, dan SMA (*berdiri*); Penyuluh Pertanian dan Petani Teladan, serta Peserta KUA Percontohan (*berdiri*); Keluarga Sakinah Teladan (*berdiri*); Arsiparis, Dosen berprestasi, Tenaga Medis Dokter dan Dokter Gigi, Tenaga Keperawatan, Tenaga Gizi teladan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat (*berdiri*); terakhir, Transmigran dan Pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teladan (*berdiri*). Sidang paripurna ini juga dimeriahkan oleh Paduan Suara Gita Bahana Nusantara.

Selanjutnya, marilah kita dengarkan Pidato Kenegaraan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Demikianlah telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Saudara Presiden. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat, kami menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan Pidato Kenegaraannya.

Selanjutnya kami minta kesediaan Saudara Menteri Agama untuk membacakan doa. Kepada Saudara Menteri Agama, kami persilahkan.

PEMBACAAN DOA OLEH MENTERI AGAMA

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Agama.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan selesainya pembacaan doa oleh Saudara Menteri Agama tadi, maka kita telah melaksanakan seluruh rangkaian acara Sidang Paripurna Dewan hari ini.

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan, sehingga memungkinkan Sidang Paripurna Dewan hari ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang Dewan ini dengan ucapan syukur *Alhamdulillah rabbil'alamin*.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 15 Agustus 2008

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

H.R. AGUNG LAKSONO